

DINAMIKA HUBUNGAN ISLAM DAN AGAMA LOKAL DI INDONESIA: PENGALAMAN TOWANI TOLOTANG DI SULAWESI SELATAN

Hasse J

Dosen Politik Islam-Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
E-mail: hasse@umy.ac.id

Abstract

This study focuses on the relation between Islam and local religion in Indonesia. The common relation pattern occurred in each encounter between Islam and local religion; is that fulfilled by the compromise and the conflict at the same time. In the case at South Sulawesi, the cultural accommodation of Towani Tolotang was able to perform it on a good situation that brought them to be accepted by the Muslims majority without relinquishing their former beliefs. In certain condition, despite the underlying differences between the two, both Islam and Towani Tolotang can hardly be socially separated from one another. Although the state admitted six religions only, but practically we found various types of religions others. Their adherents strive doing any efforts to keep their existence and continuity for their future. The result of this study shows that Towani Tolotang in its encounter with Islam emerged some types of conflicts and compromises on its dynamics.

Keywords:

State; Towani Tolotang; Islam; local religion.

Abstrak

Kajian ini difokuskan pada hubungan Islam dan agama lokal di Indonesia. Terdapat pola relasi umum yang menandai setiap perjumpaan Islam dengan agama lokal; yang di dalamnya dipenuhi dengan kompromi sekaligus konflik. Pada kasus di Sulawesi Selatan, akomodasi kultural Towani Tolotang mampu mengantarkannya pada situasi yang relatif menguntungkan karena diterima oleh kalangan Muslim mayoritas dengan tidak meninggalkan keyakinannya. Baik Islam maupun Towani Tolotang, meskipun memiliki perbedaan mendasar, namun pada kondisi tertentu keduanya secara sosial sulit dipisahkan. Meskipun negara hanya mengakui enam agama, namun pada praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk agama di luar itu. Para penganutnya pun melakukan berbagai upaya dalam rangka menjamin keberadaan dan keberlangsungannya di masa mendatang. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa Towani Tolotang dalam perjumpaan dengan Islam melahirkan berbagai bentuk konflik dan kompromi dengan segala dinamikanya.

Kata Kunci:

Negara; Towani Tolotang; Islam; agama lokal.

DOI: <http://dx.doi.org/10.15575/jw.v1i2.744>

Received: April 2016 ; Accepted: August 2016 ; Published: August 2016

A. PENDAHULUAN

Towani Tolotang merupakan 'agama' yang dianut oleh sebagian masyarakat Sidenreng Rappang (di Sulawesi Selatan) yang secara turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi melalui beberapa jalur; jalur keturunan dan konversi agama. Melalui keturunan, penganut Towani Tolotang dari waktu ke waktu terus bertambah seiring dengan angka kelahiran di internal penganutnya. Generasi Towani Tolotang 'dijamin' akan menganut

ajaran ini jika kedua orang tuanya memiliki keyakinan yang sama. Perkawinan beda agama pun dihindari demi kepentingan kemurnian ajaran dan keberlangsungan generasi. Sebab, jika salah satu dari mereka menikah dengan penganut Islam misalnya, maka kemungkinan besar anaknya bahkan dirinya berpindah agama. Pindah agama (keluar dari Towani Tolotang) telah banyak terjadi melalui perkawinan seperti ini. Sebaliknya, pasangan yang salah satunya berasal dari agama lain

jarang memilih Towani Tolotang sebagai agamanya.

Towani Tolotang, sepanjang sejarahnya, telah mengalami beberapa fase yang menunjukkan adanya dinamisasi perjuangan yang berlangsung di lingkup internalnya. Pada awal kedatangannya, Towani Tolotang mendapat penolakan dari pihak penguasa (kerajaan), namun hal tersebut teratasi setelah dialog dilakukan. Dialog yang berlangsung antara Kerajaan (*addatuang*) Sidenreng dengan Towani Tolotang menyepakati mereka dapat mendiami wilayah di sebelah Selatan Sidenreng. Pada perkembangan selanjutnya, penganut Towani Tolotang dicap sebagai penganut aliran sesat sehingga mendapat serangan berupa intimidasi bahkan fisik dari kalangan Islam yang melihat Towani Tolotang sebagai agama sempalan sehingga ia menjadi sasaran dakwah. Tindakan kekerasan pun tidak terhindarkan dan mengakibatkan konversi penganut Towani Tolotang ke dalam Islam terjadi.

Pada masa penumpasan PKI, Towani Tolotang banyak yang mengaku Islam untuk menyelamatkan diri. Upaya ini 'terpaksa' dilakukan demi keberlangsungan hidup mereka. Strategi bertahan seperti ini memberikan ruang bagi mereka untuk tetap ada meskipun dengan pengakuan yang sangat sulit dilakukan. Dalam sejarahnya, seperti yang dikemukakan oleh Atho' Mudzhar, Towani Tolotang meninggalkan kampung halamannya akibat Islam dijadikan agama kerajaan kala itu. Artinya, Islam berkontribusi bagi kepindahan Towani Tolotang, dan pada kondisi yang sulit justru Islam pula yang 'menyelamatkan' mereka. Saat ini, perubahan-perubahan pada level lokal memberikan ruang yang terkadang menguntungkan penganut agama lokal seperti Towani Tolotang. Namun, berbagai kesulitan pun dihadapi oleh mereka setelah berhadapan dengan regulasi atau kebijakan negara yang sering 'membatasi' ruang kebebasan ekspresi keagamaannya.

Keberadaan agama lokal semisal Towani Tolotang, khususnya pasca kemerdekaan, selalu mendapat gugatan. Kebijakan negara mengenai agama di Indonesia dianggap

sebagai pemicu utama munculnya gugatan-gugatan tersebut karena dari kebijakan negara pula muncul tipologi agama; 'resmi'¹ dan tidak resmi, legal dan ilegal, diakui dan tidak diakui, dan lain-lain. Ini terjadi karena penafsiran negara terhadap agama sangat kaku sehingga cenderung menguntungkan kelompok agama tertentu, sebaliknya menafikan agama-agama yang lain. Salah satu pemicu 'perkelahian' di antara agama (penganut) tidak lepas dari perlakuan negara yang menunjukkan pemihakan terhadap agama-agama tertentu.

Sikap pilih kasih dan perlakuan khusus negara terhadap agama tertentu memunculkan respons baru bagi agama-agama yang merasa dirugikan oleh kebijakan negara. Kebijakan justru memicu sikap masyarakat luas untuk turut 'mengecam' keberadaan agama-agama lokal. Kecaman mereka justru sering berakhir pada klaim sepihak dan menyalahkan orang-orang di luar kelompoknya. Eksklusivisme kemudian muncul dalam konteks masyarakat yang beragam. Sikap ini akhirnya menimbulkan kekisruhan yang sesungguhnya dapat ditangani dengan baik jika kebijakan negara betul-betul bijak dan mengayomi semua warganya.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kontribusi Islam atas Afiliasi Keagamaan Towani Tolotang

Agama yang mendapat perhatian penuh negara saat ini hanya ada enam (Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Khonghucu). Keenam agama tersebut kemudian lebih dikenal oleh publik sebagai agama 'yang diakui'.² Mereka memperoleh dukungan baik

¹ Istilah ini masih terus diperdebatkan karena dalam konstitusi negara tidak muncul istilah tersebut. Namun kemunculan istilah 'resmi' merupakan hasil interpretasi terhadap pengakuan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Sementara, agama yang berada di luar agama-agama tersebut diklaim sebagai agama tidak resmi sehingga mendapat perlakuan yang berbeda dalam berbagai kondisi. Selengkapnya lihat CRCS, *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2009* (Yogyakarta: CRCS, 2009), 16.

² Meskipun sangat sulit menemukan pada dokumen seperti apa istilah agama diakui digunakan dalam

berupa pendanaan maupun sarana dan prasarana dari negara, misalnya melalui Kementerian Agama. Ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah kepemilikan ketika si pemilik harus memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada apa yang dimilikinya sebagai perwujudan tanggungjawab. Ini juga memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai agama dalam konteks negara-bangsa sangat ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada rezim tertentu.³ Tidak hanya berhenti di situ, akibat dari kepemilikan tadi, agama-agama tersebut pun dengan mudah dapat dikontrol dan ditata oleh negara.

Intervensi negara yang sangat kental terhadap agama dalam konteks Indonesia tidak bisa terlepas dari bentuk negara yang dianut. Indonesia menyepakati dan menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologisnya. Indonesia, mayoritas penduduknya menganut Islam sebagai agamanya, tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara. Proses penentuan dasar negara dilakukan dengan pengkompromian antara agama [khususnya Islam] dengan kondisi riil bangsa yang serba majemuk termasuk kemajemukan agama dan kepercayaan yang telah mengakar kala itu. Hasil kompromi tersebut kemudian mengukuhkan Pancasila sebagai dasar negara setelah melalui perdebatan yang panjang oleh pada pendahulu bangsa, meskipun aktor perumus yang terlibat mayoritas Islam. Alasan yang digunakan sehingga memilih Pancasila sebagai dasar negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah mencerminkan nilai-

dokumen resmi negara. Akan tetapi, istilah inilah yang kemungkinan lebih mudah dipahami dan juga memudahkan identifikasi mengenai agama-agama di Indonesia. Dalam tulisan ini, istilah ini digunakan untuk mengkontraskan antara agama-agama tadi dengan agama-agama lokal yang masih ada hingga saat ini. Pemilihan istilah ini bukan untuk menjustifikasi kebenaran terhadap keberadaan agama tertentu, tetapi dalam rangka memudahkan identifikasi saja.

³ Perdebatan mengenai jumlah agama pun selalu hangat karena banyak persoalan yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Salah satu persoalan yang muncul adalah parameter atau ukuran yang digunakan untuk menentukan sebuah agama sehingga ia 'layak' disebut sebagai agama. Persoalan yang juga penting adalah siapa yang berkompeten menentukan sebuah agama.

nilai Islam itu sendiri sehingga secara substantif dianggap sangat islami, selain merupakan representasi dari keragaman bangsa yang sangat mejemuk.

Salah satu bentuk intervensi negara terhadap agama adalah penentuan kriteria atau kategori agama itu sendiri. Ada empat kategori umum yang dijadikan acuan negara dalam menentukan agama,⁴ yakni memiliki kitab suci, memiliki nabi, memiliki penganut secara internasional (komunitas), dan memiliki sarana ibadah. Jika jeli melihat kategori tersebut, di antara enam yang diakui pun masih mengalami kendala. Istilah nabi misalnya, dalam agama Hindu dan Budha tidak ditemukan sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan negara selama ini juga tidak konsisten dan cenderung hanya menguntungkan pihak tertentu. Negara dengan kekuatannya menaklukkan agama. Demikian pula, dengan mudahnya negara menyisipkan kepentingannya. Inilah risiko dari tidak adanya penyatuan dan pemisahan di antara keduanya secara tegas seperti yang dianut di negara-negara lain.⁵

Sikap negara yang tidak melepaskan agama dari kekuasaannya berdampak pada munculnya keinginan untuk menggunakan agama sebagai pendukung kekuasaan. Agama sangat berpotensi dijadikan lahan subur untuk kepentingan politik sehingga agama pun sulit menampakkan wajah aslinya. Dengan kondisi demikian, agama pun kemudian tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan sehingga dengan mudah agama bisa diperlakukan sesuai keinginan dan kepentingan penguasa. Agama sering menjadi alat legitimasi kepentingan dan

⁴ Anas Saidi, *Meneguk Agama, Membangun Tahta* (Depok: Desantara, 2004), 60.

⁵ Di negara-negara Eropa dan Amerika misalnya, terdapat pemisahan yang jelas antara agama dan negara sehingga keduanya berada pada ranah dan urusan yang berbeda. Demikian pula di beberapa negara Islam di Timur Tengah yang secara tegas menyatukan antara negara dan agama sehingga urusan mengenai agama jelas menjadi urusan negara. Sementara itu, di Indonesia memilih jalan tengah dengan mengakomodasi keduanya. Kementerian Agama merupakan hasil kompromi negara dalam mengurus agama. Ini juga merupakan upaya untuk terus memposisikan agama tetap berada dalam bayang-bayang kontrol negara.

kekuasaan negara. Bahkan, negara dengan sangat mudah melakukan berbagai tindakan dengan mengatas-namakan agama. Parahnya lagi, agama justru sering difungsikan sebagai alat penindas terhadap pemeluk agama itu sendiri.⁶ Negara pun hadir, namun lalai dalam mengawal dan memberikan rasa aman (perlindungan) kepada warganya.

Disadari atau tidak, realitas kehidupan beragama di Indonesia selalu dihadapkan pada persoalan yang kompleks, seperti salah satunya kategori penentuan agama tadi. Keberadaan agama-agama lokal yang masih bertahan hingga kini di seluruh penjuru Nusantara selalu tidak mendapat tempat yang layak, bahkan di hadapan negara sekalipun. Mereka dianggap sebagai agama yang 'tidak penting' sehingga kebijakan terkadang tidak berpihak kepada mereka. Agama-agama lokal, kalau mau jujur, merupakan agama original negeri ini yang telah dianut dan ajaran-ajarannya dipraktikkan oleh nenek-moyang jauh sebelum agama-agama [resmi] sekarang ada. Agama-agama resmi (kemudian ada yang menyebutnya agama mainstrim),⁷ yang ada saat ini, justru merupakan agama 'impor' yang dibawa oleh para pendakwa/misionaris. Akibatnya, pertemuan antara agama lokal dan agama impor tersebut memosisikan agama lokal pada posisi yang terjepit. Agama lokal mendapat 'serangan' dari agama resmi sehingga tergusur karena memiliki karakter baru yang sulit dikompromikan.

Pengafiliasian agama lokal ke dalam agama resmi seperti Towani Tolotang ke dalam agama Hindu didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat pragmatis. Misalnya, mengingat

⁶ Hal ini sangat tepat dikatakan politisasi agama di mana agama dijadikan alat justifikasi atau pengesah terhadap tindakan aktor tertentu, termasuk negara. Agama dapat dimanfaatkan sesuai kepentingan. Di Indonesia, pelibatan agama dalam politik seperti ini sangat 'lazim' khususnya menjelang perhelatan pesta demokrasi seperti pemilu dan pilkada.

⁷ Istilah ini digunakan oleh para ahli, salah satu alasannya adalah, untuk membedakan antara agama-agama 'resmi' dengan agama-agama yang ada di luarnya. Istilah ini misalnya digunakan oleh Zuly Qodir untuk menyebutkan bahwa di luar agama-agama mainstrim (khususnya Islam), juga terdapat gerakan-gerakan keagamaan non-mainstrim.

payung konstitusi negara yang hanya mengakui enam agama, maka agama selain keenam agama tersebut harus memilih salah satu agama sebagai induk⁸ sehingga tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali memilih salah satu dari enam agama itu. Dengan kondisi seperti ini, maka agama lokal seperti Towani Tolotang harus memilih salah satu dari enam agama tersebut. Dalam legalitas formal keagamaan, penganut Towani Tolotang pun mencantumkan Hindu sebagai agama formalnya sehingga memiliki hak sebagaimana penganut agama-agama lain. Segala bentuk kepentingan administratif pun kemudian menggunakan Hindu sebagai agamanya. Pada satu sisi, hal ini memberikan 'perlindungan' kepada Towani Tolotang karena memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pemeluk agama-agama lain seperti Islam, Kristen, dan lainnya.

Namun demikian, dalam praktiknya mereka tetap saja pada komitmen awal yakni menjaga dan melestarikan Towani Tolotang yang telah diwarisinya secara turun-temurun hingga saat ini. Bagi mereka, meninggalkan Towani Tolotang sama artinya 'mengkhianati' leluhur. Leluhur sendiri dalam kepercayaan Towani Tolotang memiliki posisi yang sangat penting, karena leluhur inilah yang diyakini sebagai pembawa dan penyampai ajaran tersebut. Tentu saja, pilihan ini dapat dimaknai sebagai sebuah bentuk kepatuhan dan ketaatan yang tinggi terhadap ajaran. Akan tetapi, kondisi ini juga memperlihatkan adanya resistensi yang ditunjukkan oleh mereka, yang juga diarahkan pada kebijakan negara yang dianggap diskriminatif.⁹

Dalam sejarahnya, seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Towani Tolotang

⁸ Hasse J, "Globalisasi dan respons Agama Lokal: Pilihan Strategi untuk Bertahan di Tengah Perubahan," *Jurnal At-Tafkir* VIII, no. 2 (2014): 4.

⁹ Kondisi seperti inilah yang banyak terjadi dan ditemukan di beberapa tempat di mana penganut agama lokal tertentu dipaksa memilih di antara enam agama yang diakui. Sikap mereka pun hampir sama, secara formal menerima agama yang dipilhkan namun pada praktiknya tetap pada ajaran sebelumnya. Sesungguhnya, pilihan strategi yang dilakukan oleh Towani Tolotang juga dilakukan oleh kelompok agama serupa demi kepentingan keberlangsungan dan keamanan.

hingga saat ini menjadi sebuah kelompok di Sidenreng Rappang memiliki hubungan dengan Islam ketika dijadikan agama resmi Kerajaan Wajo kala itu. Islam pun kemudian yang menyebabkan mereka ‘tersisih’ dan diberikan tempat oleh penguasa *Addatuang Sidenreng* di sebelah Selatan Amparita hingga sekarang. Tentu saja, perbedaan keyakinan antara Towani Tolotang dan Muslim selamanya akan menimbulkan ketegangan. Namun demikian, tidak berarti pula bahwa kompromi tidak terjadi. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, baik Towani Tolotang maupun Islam saling berbaur. Dalam kegiatan-kegiatan sosial mereka sangat terbuka dan saling membantu, bahkan pada kegiatan pembangunan masjid.

2. Dinamika Relasi Islam dan Towani Tolotang: antara Konflik dan Kompromi

Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan orang Bugis.¹⁰ Islam ditempatkan pada posisi paling puncak dalam kehidupan. Islam pun menjadi payung atau inspirasi bagi seluruh aktivitas yang dilakukan. Setiap aktivitas senantiasa dimulai dengan Basmalah dan seterusnya. Dalam perayaan peristiwa keislaman misalnya, orang Bugis sangat menonjolkan sikap bahwa Islam merupakan agama paling benar. Bahkan, orang Bugis yang memang beragama Islam sangat marah jika dikategorikan sebagai bukan Muslim meskipun praktik ajaran tidak dilaksanakan. Artinya, secara formal ingin disebut Islam namun dalam praktiknya justru bertolak-belakang. Rukun Islam yang paling banyak ditinggalkan adalah shalat. Rukun Islam lainnya sangat diprioritaskan khususnya Haji.

Akan tetapi, di tengah sikap fanatik orang Bugis dalam menjalankan ajaran Islam, keteguhan mereka (Bugis) mempertahankan adat istiadat juga dapat ditemukan. Mereka tidak hanya dikenal sebagai penganut Islam fanatik, mereka juga dikenal sangat loyal terhadap adat. Aktivitas Towani Tolotang, bagi orang Islam, lebih dianggap sebagai ritual adat. Di sinilah kemudian, dalam kehidupan

orang Bugis antara adat dan Islam tidak hanya diperlawankan tetapi juga dikompromikan. Adat merupakan warisan nenek moyang yang diakui masih memiliki fungsi yang luhur sehingga masih dipertahankan karena merupakan pedoman untuk mendapatkan kebahagiaan dunia.¹¹ Basis ajaran ajaran Towani Tolotang adalah warisan leluhur, demikian pula adat. Pada titik inilah, antara adat dan aktivitas keagamaan Towani Tolotang sulit dipisahkan. Pada upacara kematian misalnya, sangat banyak rangkaian yang berbaur adat. Baik Muslim maupun Towani Tolotang masih mempraktikkannya. Misalnya, pemberian sajen bagi orang telah meninggal. Dalam persepsi Islam, hal ini merupakan tindakan yang bukan Islam, itu cuma praktik adat. Sementara bagi Towani Tolotang, justru sebaliknya.

Pertarungan Islam dan adat di kalangan orang Bugis memberikan corak dalam pengamalan Islam. Meskipun Islam diyakini sebagai agama yang berisi tentang ajaran-ajaran agung, tidak menjamin perilaku mereka terlepas dari pengaruh-pengaruh adat. Islam yang hingga saat ini terus didakwahkan belum mampu mengikis habis perilaku lama orang Bugis yang sangat fanatik terhadap adat.¹² Pertemuan kedua entitas ini pun melahirkan fanatisme yang ‘berlebihan’ sehingga tidak hanya menimbulkan kompromi tetapi juga konfrontasi. Akomodasi-akomodasi kultural terjadi pada hampir seluruh siklus kehidupan orang Bugis.¹³ Pada kasus lain, keberhasilan

¹¹ Hamid Abdullah, *Manusia Bugis Makassar* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1985), 7.

¹² Hal ini juga merupakan sebuah bukti bahwa Islam sesungguhnya tidak anti terhadap budaya. Islam bahkan jika dibandingkan dengan agama-agama lain di Indonesia, lebih toleran terhadap budaya. Budha masih ke Indonesia dengan membawa Stupa, demikian juga Hindu. Kristen membangun gereja berarsitektur asing. Islam tidak memindahkan simbol-simbol budaya Islam yang ada di Timur Tengah ke Indonesia. Lihat, Kuntowijoyo, *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia* (Yogyakarta: Salahuddin Press dan Pustaka Pelajar, 1994), 12-13.

¹³ Pada pelaksanaan ritual kematian misalnya, antara agama dan adat menyatu dalam prosesi tersebut. Sangat sulit memisahkan antara keduanya, bahkan sulit dipilah mana agama, mana adat. Salah satu yang unik adalah, si

¹⁰ Christian Pelras, *Manusia Bugis* (Jakarta: Nalar, 2006), 209.

Towani Tolotang berbaur dalam kultur Bugis yang sangat identik dengan Islam menjadikan mereka mendapat ruang dalam pergaulan sosial. Pemilahan antara penganut Islam dan Towani Tolotang pun terbalut bersama kesamaan etnis Bugia. Bahkan, nilai-nilai kebugisan menyatukan Towani Tolotang dan Muslim di tengah berbagai bentuk perdebatan mengenai status keagamaan masing-masing.

3. Towani Tolotang: antara Konstruksi Negara vs Masyarakat

Pemandangan yang tidak kalah menariknya untuk disikapi adalah pengakuan masyarakat bahkan pemerintah daerah terhadap keberadaan Towani Tolotang. Meskipun negara menganggapnya sebagai bagian dari agama Hindu, namun masyarakat menyebutkan sebagai agama Towani Tolotang. Perbedaan ‘tafsir’ ini disebabkan oleh [mungkin] tidak lepas dari cara negara mendefinisikan agama yang sangat ketat dengan ciri-ciri yang jelas. Sementara itu, masyarakat dengan parameter-nya sendiri mendefinisikan sebuah agama hanya sebagai identitas keyakinan yang membedakan dengan apa yang dianutnya. Towani Tolotang pun di Sidenreng Rappang disebut sebagai agama untuk membedakan dengan Muslim. Artinya, masyarakat setempat mengakui sebagai sebuah agama, meskipun memiliki perbedaan mendasar dengan standar agama menurut negara. Pengakuan ini dapat dilihat sebagai sebuah bentuk penafsiran masyarakat yang tidak terpaku pada parameter yang formal, tetapi lebih didasarkan pada asumsi bahwa keyakinan yang ada di luar

mereka [Muslim dan lain-lain] juga adalah agama.

Afiliasi agama Towani Tolotang, sedikit banyak, menguntungkan penganutnya sendiri. Sebab, ketika Towani Tolotang menjadi bagian dari Hindu secara formal, maka pihak mana pun tidak lagi mendapat celah untuk melakukan pengusuran karena ia telah mendapat legalitas negara. Pada awal kedatangannya Towani Tolotang di Sidenreng Rappang, salah satu faktor yang mendorong mereka bermigrasi dari daerah asal adalah adanya instruksi penguasa yang menyerukan penduduknya memeluk Islam. Instruksi tersebut ditolak dan sebagai konsekuensinya, mereka harus meninggalkan daerah tersebut. Setelah beberapa lama berdiam di Sidenreng Rappang dengan berbagai kompleksitas persoalan yang dihadapi, mereka mampu bertahan dan terus berkembang meskipun tidak pernah lepas dari berbagai bentuk ancaman yang juga berdampak pada keberadaan dan keberlangsungan Towani Tolotang di masa mendatang.

Keberadaan Towani Tolotang hingga saat ini dengan segala dinamikanya menunjukkan bahwa, *pertama*, masyarakat telah dewasa dalam merespons perbedaan. Kehidupan sosial masyarakat, di tempat Towani Tolotang bermukim, menunjukkan adanya saling pengertian dan penghormatan terhadap yang lain. Pemukiman antara Towani Tolotang dan Muslim di Sidenreng Rappang menyatu, bahkan sulit membedakan antara keduanya. Perbedaan keyakinan hanya berlaku pada kepentingan ibadah saja. Pada saat tertentu, seperti bulan puasa, penganut Towani Tolotang pun turut menjaga ‘kesucian’ bulan puasa dengan tidak makan dan minum di tempat terbuka. Bahkan, pada perayaan lebaran, di antara dua penganut agama saling mengunjungi. Padahal, dalam sejarahnya, Towani Tolotang memiliki memori ‘buruk’ terhadap Islam, seperti pada masa awal kedatangannya di Sidenreng Rappang. Kala itu, terjadi penolakan terhadap keberadaan Towani Tolotang.¹⁴

mati dikeluarkan dari rumah tidak melalui pintu, tetapi melalui jendela. Hal-hal lain yang juga terjadi dialog adat dan agama adalah ketika pemakaman telah selesai dilakukan. Terdapat beberapa ritual lagi yang dilakukan oleh keluarga. Hal ini juga dapat ditemukan di tempat lain misalnya pada ritual kematian masyarakat Melayu di Pontianak Kalimantan Barat. Untuk lebih jelasnya lihat, Sumarman Muhammad Djar’ie dan Zaenuddin Hudi Prasajo, “Religion, Culture, and Local Wisdom in the Death Ritual of Pontianak Malay Society,” *Al Albab: Borneo Journal of Religious Studies* 4, no. 2 (2015): 201–16.

¹⁴ Lihat, Hasse J, *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM-Pustaka Pelajar, 2008), 255.

Kedua, kemampuan Towani Tolotang berkomunikasi membuka peluang dan ruang yang cukup luas sehingga dapat diterima oleh pihak lain, termasuk dengan Islam.¹⁵ Sikap inklusif yang ditunjukkan oleh Towani Tolotang seperti bersosialisasi dengan penganut agama lain, menempatkannya pada posisi yang tidak asing di lingkungan pergaulan sosial mereka. Pembauran karena kondisi geografis pemukiman yang terintegrasi, memberikan ruang komunikasi yang terbuka dengan orang lain. Demikian pula, populasi yang cukup signifikan menempatkan Towani Tolotang pada perebutan kepentingan elite, khususnya elite politik lokal. Kasus seperti ini hampir ditemukan pada kasus-kasus yang melibatkan agama lokal.¹⁶

Ketiga, eksistensi Towani Tolotang merupakan salah satu perlawanan terhadap dominasi negara. Afiliasi ke dalam agama Hindu merupakan pilihan yang kompleks. Pada satu sisi, menganut agama Hindu berarti 'aman' dari berbagai tindakan yang menyudutkan Towani Tolotang meskipun ini merupakan bentuk upaya agamaisasi/hinduisasi.¹⁷ Namun pada sisi lain, menganut Hindu dapat mereduksi ajaran yang telah diwarisi dari para leluhur yang juga berarti mengingkari leluhur. Eksistensi Towani Tolotang, secara struktural merupakan bagian dari agama Hindu dengan tetap pada praktik Towani Tolotang, merupakan bentuk penolakannya terhadap penataan negara dengan tawaran afiliasi agama. Berbagai aktivitas keagamaan yang berbeda dengan Hindu menegaskan soliditas ajaran yang masih dipertahankan hingga saat ini di kalangan Towani Tolotang. Kasus yang paling tampak adalah penguburan bagi mayat;

berbeda dengan umat Hindu khususnya di Bali yang dibakar.

Perlakuan negara dan masyarakat pun terhadap Towani Tolotang sangat berbeda. Negara, meskipun dengan tujuan penataan, menempatkan Towani Tolotang sebagai 'objek' sehingga rawan terhadap perlakuan diskriminatif. Sebab, ia diposisikan sebagai bagian dari sebuah agama yaitu Hindu. Negara dengan standarnya, menyebut Towani Tolotang bukan sebagai sebuah agama dan tentu saja bertolak-belakang dengan realitas kesehariannya karena masyarakat di sekitarnya justru menyebut Towani Tolotang sebagai sebuah agama.¹⁸ Mereka pun dipanggil penganut Agama Tolotang. Persepsi yang berbeda ini menegaskan adanya disparitas pemahaman dan pemaknaan tentang agama itu sendiri yang hingga kini belum usai. Negara hanya mengedepankan aspek 'penyeragaman' sehingga hanya mengakui beberapa agama. Sementara itu, masyarakat [dalam konteks tulisan ini yaitu masyarakat Sidenreng Rappang] melihat apa yang berada di luarnya sebagai sebuah agama yang berbeda dengannya.

C. SIMPULAN

Keberadaan agama-agama lokal Indonesia yang berada di tengah dominasi 'agama mainstrim' khususnya Islam memberikan ruang negosiasi bagi antara keduanya. Islam merupakan 'agama negara', memberikan nuansa baru bagi keberadaan agama-agama lokal yang berdampak pada strategi masing-

¹⁵ Lihat, Hasse J, *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar-TICI Publications, 2009), 241-242.

¹⁶ Zainal Abidin Bagir, *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia* (Bandung: Mizan, 2011), 156.

¹⁷ Martin Ramstedt, *Hinduism in Modern Indonesia: A Minority Religion between Local, National, and Global Interests* (London: Routledge Curzon, 2004), 191.

¹⁸ Towani Tolotang bahkan dianggap sebagai kelompok atau aliran kepercayaan yang terlarang bersama dengan 15 kelompok yang lain. Selengkapnya lihat Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 236. Anggapan ini kemungkinan juga disebabkan oleh kurang-pahaman masyarakat mengenai apa itu agama dan standar apa yang digunakan oleh negara dalam menentukan sebuah agama. Atau, justru masyarakat lebih menempatkan agama bukan pada persoalan formalitasnya (bentuk) yang harus diukur dengan berbagai variabel dan indikator, tetapi pada esensi agama itu sendiri yang lebih cenderung pada penghayatan tentang makna kehidupan yang di dalamnya juga terdapat pemahaman mengenai Yang Maha Tinggi.

masing agama dalam, selain berhadapan dengan negara juga dengan masyarakat. Towani Tolotang, sebagai salah satu agama lokal, menerima langsung dampak dari penataan negara terhadap agama-agama ini. Seperangkat regulasi telah menyedot energi Towani Tolotang untuk terus berdinamika dengan agama-agama negara khususnya Islam di satu sisi, dan berusaha melakukan redefinisi ajaran sehingga mampu berdialog dengan zaman (lingkungan) di sisi lain.

Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh penduduk bangsa ini menjadi tolak ukur penataan sekaligus pedoman penentuan sebuah agama. Islam pun kemudian, meskipun dianggap agama paling ‘muda’ di Indonesia, mampu menjadi rujukan dan pilihan utama mayoritas masyarakat, bahkan negara dalam memformulasikan kebijakan. Islam pun sangat identik dengan negara. Pengaruh Islam sangat dominan, tidak hanya terbatas pada penyebaran ajaran, tetapi juga pada penataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara luas. Posisi yang mayoritas ini berdampak pada model komunikasi dengan agama lain, termasuk Towani Tolotang. Apakah Towani Tolotang menjadi sasaran dakwah atau selainnya menjadi tanda tanya di sini. Jika ia menjadi sasaran dakwah maka berbagai kemungkinan konflik akan muncul.

Keberadaan Towani Tolotang yang hingga kini terus berlangsung menunjukkan kuatnya upaya yang dilakukan dalam mempertahankan nilai-nilai dan ajaran-ajaran leluhur. Hal ini juga menunjukkan bahwa soliditas yang terbangun dalam komunitas agama lokal sangat kuat sehingga penetrasi apapun seperti yang dilakukan oleh negara tidak serta-merta mampu menghapus spirit mereka untuk terus berkomitmen menjaga ajaran. Demikian pula, hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat toleran dan menghargai perbedaan keyakinan. Islam bukanlah agama anti terhadap perbedaan, justru sebaliknya. Pertemuan Islam dan Towani Tolotang melahirkan pola komunikasi yang memberikan pemahaman bahwa perbedaan itu ada dan mustahil dihilangkan. Akan

tetapi, dari perjumpaan seperti ini dapat dijadikan model atau pola komunikasi dalam rangka meneguhkan Indonesia yang lebih damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahnaf, Mohammad Iqbal. “Anticipating Abdullah, Hamid. *Manusia Bugis Makassar*. Jakarta: Inti Idayu Press, 1985.
- Bagir, Zainal Abidin. *Pluralisme Kewargaan: Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*. Bandung: Mizan, 2011.
- CRCS. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2009*. Yogyakarta: CRCS, 2009.
- Djar’ie, Sumarman Muhammad, dan Zaenuddin Hudi Prasojo. “Religion, Culture, and Local Wisdom in the Death Ritual of Pontianak Malay Society.” *Al Albab: Borneo Journal of Religious Studies* 4, no. 2 (2015): 201–16.
- J, Hasse. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM-Pustaka Pelajar, 2008.
- . *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar-TICI Publications, 2009.
- . “Globalisasi dan respons Agama Lokal: Pilihan Strategi untuk Bertahan di Tengah Perubahan.” *Jurnal At-Ta’fikir* VIII, no. 2 (2014): 4.
- Kuntowijoyo. *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*. Yogyakarta: Salahuddin Press dan Pustaka Pelajar, 1994.
- Mudzhar, Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Pelras, Christian. *Manusia Bugis*. Jakarta: Nalar, 2006.
- Ramstedt, Martin. *Hinduism in Modern Indonesia: A Minority Religion between Local, National, and Global Interests*. London: Routledge Curzon, 2004.
- Saidi, Anas, ed. *Meneguk Agama, Membangun Tahta: Kebijakan Agama Orde Baru*. Depok: Desantara, 2004.